

REFERENSI

No. 16/ref.PKA/APBN/VIII/2019

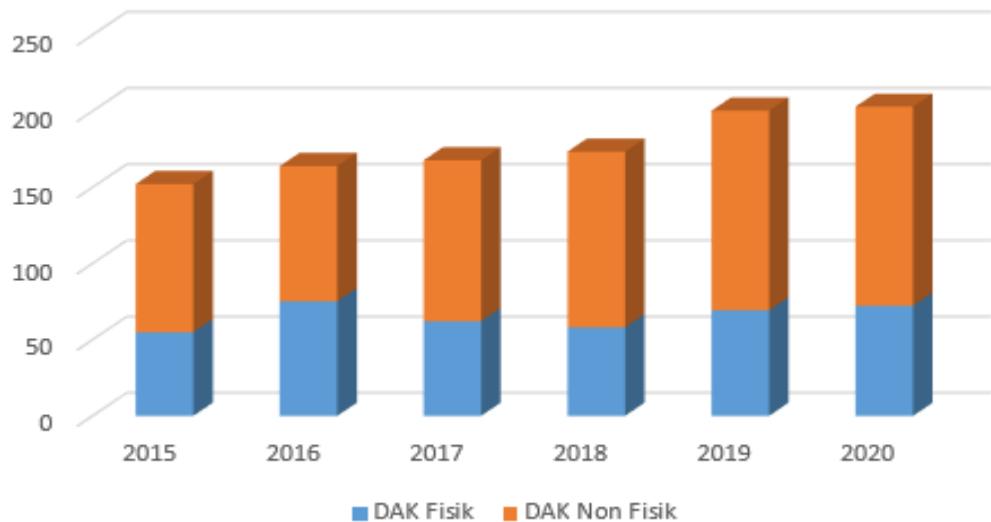
Perkembangan dan Arah
Kebijakan Dana Transfer Khusus (DTK)

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

PERKEMBANGAN DAN ARAH KEBIJAKAN DANA TRANSFER KHUSUS (DTK)

Dana Transfer Khusus (DTK) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. DTK harus digunakan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana infrastruktur masyarakat yang belum mencapai Standar Pelayanan Minimal dan Norma Standar Pedoman dan Kriteria atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

**Gambar 1. Perkembangan Dana Transfer Khusus (DTK) Tahun 2014-2019
(Rp triliun)**



Sumber: LKPP berbagai tahun dan Nota Keuangan 2020

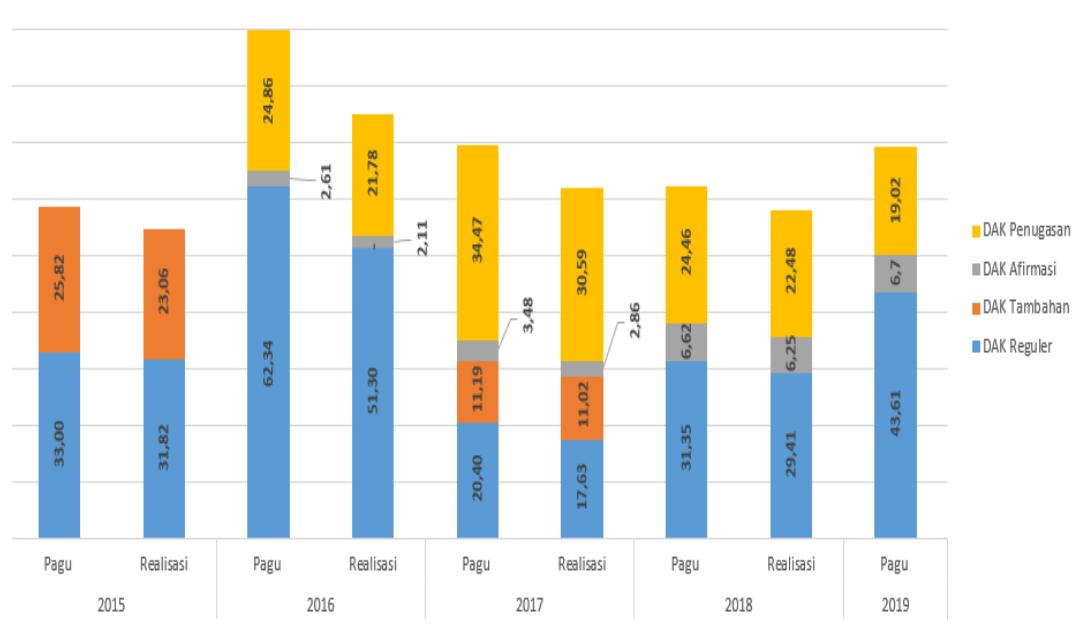
Pada perkembangannya alokasi besaran DTK senantiasa meningkat tiap tahunnya. Dalam RAPBN tahun 2020, anggaran DTK direncanakan sebesar Rp202,8 triliun atau meningkat sebesar Rp2,5 triliun (1,2 persen) apabila dibandingkan dengan APBN tahun 2019. Alokasi DAK tersebut terdiri atas DAK Fisik Sebesar Rp72,2 triliun , dan DAK Non fisik sebesar Rp130,6 triliun.

I. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK

Salah satu instrumen penting dalam mendanai infrastruktur dan sarana/prasarana pelayanan publik dan penunjang kegiatan ekonomi yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan prinsip money follow program adalah melalui DAK Fisik. Menurut kegunaannya, DAK Fisik dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan dan DAK Fisik Afirmasi.

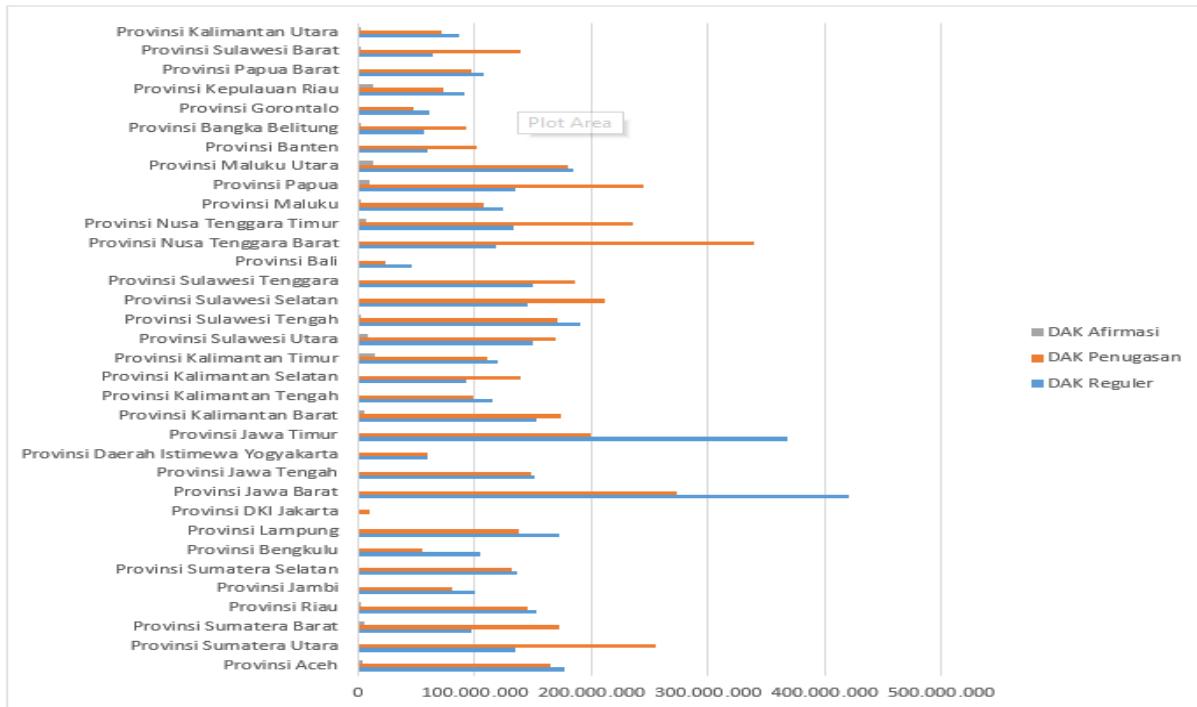
Selama lima tahun terakhir, alokasi DAK fisik berfluktuatif. Dan selama tahun-tahun tersebut, realisasi DAK belum mencapai pagu yang ditetapkan. Pada APBN 2019, DAK Fisik dialokasikan sebesar Rp69,3 triliun, yang terdiri atas DAK Reguler sebesar Rp43,6 triliun, DAK Penugasan sebesar Rp19,02 triliun, dan DAK Afirmasi sebesar Rp6,7 triliun. Berikut perkembangan DAK Fisik tahun 2015-2019.

Gambar 2. Perkembangan DAK Fisik Tahun 2015-2019 (Rp triliun)



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan RI & LKPP

Gambar 3. Alokasi DAK Fisik Per Provinsi Tahun 2019



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan RI

Berdasarkan tingkat provinsi, alokasi DAK Reguler paling banyak dialokasikan pada provinsi Jawa Barat, DAK Penugasan pada Provinsi NTB, dan DAK Afirmasi pada Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 4. Progress Rencana Kegiatan, Kontrak dan Penyaluran DAK Fisik TA 2019

(Rp triliun)

Bidang	Pagu	RK	Kontrak	Penyaluran	% (Salur/Pagu)
Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,53	0,51	0,41	0,14	26,45
Kelautan dan Perikanan	0,91	0,90	0,81	0,20	22,18
Sanitasi	2,00	1,99	1,92	0,44	22,05
Pertanian	1,90	1,89	1,71	0,38	19,89
Pendidikan	16,86	16,82	16,08	3,22	19,11
Perumahan dan Permukiman	1,13	1,12	1,09	0,21	19,04
Air Minum	2,07	2,05	1,88	0,37	17,75
Pariwisata	1,00	1,00	0,86	0,15	15,36
Irigasi	3,00	2,97	2,58	0,43	14,41
Jalan	16,24	16,23	14,95	2,33	14,36
Pasar	1,77	1,77	1,56	0,22	12,24
Kesehatan	19,88	19,41	17,56	2,25	11,33
Transportasi	1,50	1,50	1,33	0,15	9,96
Industri Kecil dan Menengah	0,54	0,53	0,45	0,05	9,53
Grand Total	69,33	68,71	63,21	10,55	15,22

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan RI

Per Juli 2019, DAK Fisik yang sudah tersalur sebesar Rp10,55 triliun atau sebesar 15,22 persen dari pagu yang ditetapkan.

Perkembangan Kebijakan DAK Fisik

Dalam periode tahun 2015- 2019, terjadi beberapa perubahan kebijakan, baik dalam mekanisme pengalokasian maupun mekanisme penyaluran DAK Fisik. Mekanisme pengalokasian DAK Fisik mengalami perubahan yang cukup signifikan, dimana dalam periode sebelum tahun 2015, mekanisme pengalokasian lebih bersifat *top-down* menggunakan *formula based*, sedangkan untuk periode setelah tahun 2015, mekanisme alokasi merupakan kolaborasi antara kebijakan *top-down* dan *bottom-up* berdasarkan usulan daerah dan kesesuaian dengan prioritas nasional.

Mekanisme penyaluran DAK Fisik pada periode tahun 2015-2019 juga mengalami beberapa perubahan. Persyaratan penyaluran DAK Fisik mengalami beberapa penambahan yaitu pada tahun 2017 rekapitulasi daftar kontrak, tahun 2018 rencana kegiatan, dan tahun 2019 adanya reviu atas laporan realisasi penyerapan dan dan capaian output dari Inspektorat Daerah atau lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ARAH KEBIJAKAN DAK FISIK 2020

EKSISTING/ PENGUATAN

- Menerapkan konvergensi pendanaan antara DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Dana Desa untuk kegiatan pengentasan *stunting* serta program Indonesia bersih & sehat (air minum, sanitasi, kesehatan & LHK)
- Memperkuat sinergi pendanaan kegiatan yang dibiayai dari Kementerian/Lembaga dan DAK Fisik.
- Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- Memperkuat kebijakan afirmasi utamanya infrastruktur konektivitas: daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar, percepatan pembangunan Papua dan Papua barat.

BARU

- Melakukan retrukturisasi bidang DAK Fisik dengan mengalihkan beberapa bidang pada jenis Reguler ke jenis Penugasan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional
- Memperluas cakupan bidang, subbidang, dan menu kegiatan, meliputi: Bidang Baru (Bidang Sosial dan Bidang Transportasi Laut); Subbidang Baru (Bidang Pendidikan, Bidang Jalan, dan Bidang Kesehatan; dan Menu Kegiatan Baru (Penanganan Sungai)

BIDANG BARU

Bidang Sosial :

Meningkatkan kualitas layanan dan keterjaminan akses kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak. Untuk mendorong percepatan penurunan kemiskinan, kesenjangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Bidang Transportasi Laut:

Mendukung peningkatan keselamatan, kualitas pelayanan transportasi perairan, serta sebagai *feeder* /*subfeeder* tol laut melalui pemenuhan infrastruktur yang memadai dalam rangka

Ruang Lingkup:

- Rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang dalam panti rehabilitasi sosial yang dimiliki oleh pemerintah provinsi bagi penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak.
- Pengadaan peralatan bantu penerima layanan di panti rehabilitasi sosial provinsi dan luar panti di kabupaten/kota bagi penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak.
- Rehabilitasi prasarana dan sarana untuk mendukung layanan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai tempat dukungan pelayanan/pendampingan, pengaduan serta rujukan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak di tingkat desa.
- Pengadaan perangkat pengelolaan data di daerah dan layanan pemanfaatan basis data terpadu kesejahteraan sosial.

Ruang Lingkup:

- Pengembangan/Rehabilitasi fasilitas dermaga/pelabuhan; dan
- Pengadaan Sarana (Moda)

SUBBIDANG BARU

Bidang Pendidikan

•Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan secara bertahap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

•Ruang Lingkup:

- Rehabilitasi Prasarana Belajar PAUD;
- Pembangunan Prasarana Belajar PAUD; dan
- Pengadaan Sarana Belajar PAUD.

Bidang Jalan

• Keselamatan Jalan:

Mendukung peningkatan keselamatan transportasi darat melalui pemenuhan aspek-aspek keselamatan jalan pada Kawasan Prioritas Nasional (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) dan atau daerah dengan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas yang tinggi.

•Ruang Lingkup:

- Pengadaan dan Pemasangan perlengkapan jalan.
- Pengadaan alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Bidang Kesehatan

• Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi:

Mendukung program untuk penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi) yang di Indonesia masih cukup tinggi.

•Ruang Lingkup:

- Penguatan Unit Transfusi Darah/Bank Darah RS
- Penguatan Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)
- Penguatan RS Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensi (PONEK)
- Penyediaan Obat Kegawatdaruratan Maternal Neonatal

• RS dan Puskesmas Pariwisata:

Mendukung penyediaan fasilitas kesehatan untuk lokasi prioritas di sektor Pariwisata.

•Ruang Lingkup:

- Pembangunan dan Rehabilitasi RS dan Puskesmas Pariwisata
- Penyediaan Prasarana pada RS dan Puskesmas Pariwisata
- Penyediaan Alat Kesehatan pada RS dan Puskesmas Pariwisata

MENU KEGIATAN BARU

Menu Penanganan Sungai :

Mengurangi risiko banjir pada daerah irigasi khususnya irigasi permukaan yang berada pada Wilayah Sungai (WS) kewenangan Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengendali banjir; Mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup pada wilayah sungai.

➤ Bidang Irigasi:

Ruang Lingkup:

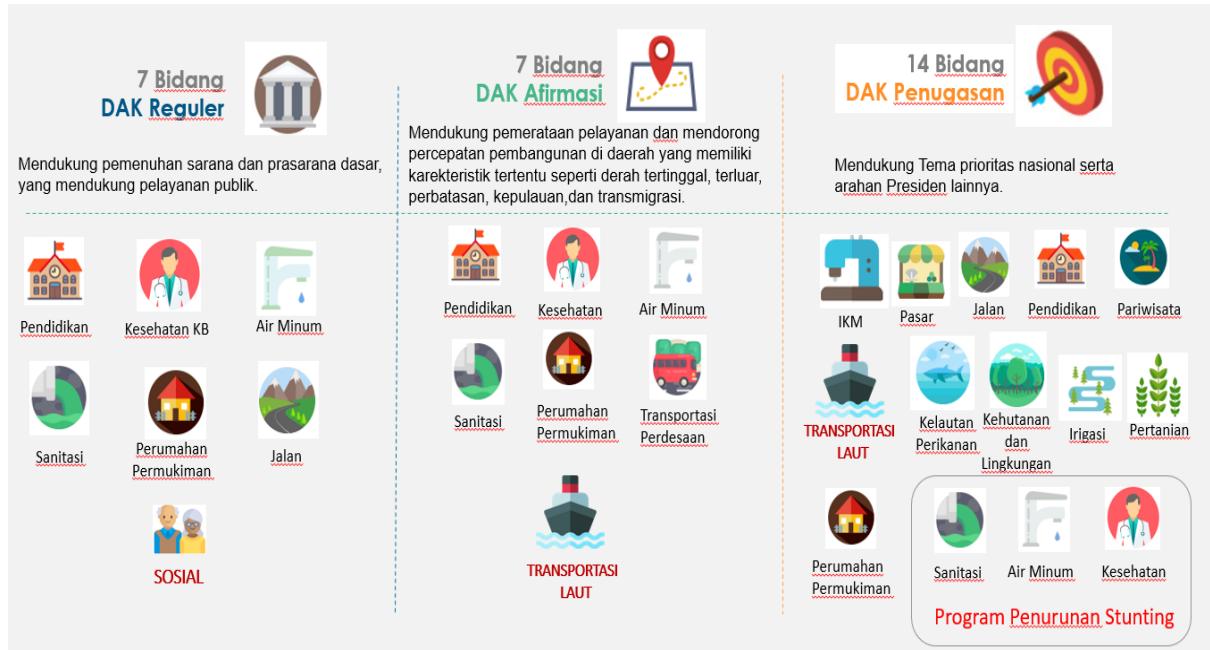
1. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir
2. Peningkatan infrastruktur pengendali banjir.

➤ Bidang LHK:

Ruang Lingkup:

1. *Online Monitoring System (Onlimo)*, sistem pemantauan kualitas air secara *online* dan *realtime*
2. Rehabilitasi sempadan sungai

RENCANA BIDANG-BIDANG DAK FISIK 2020



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan RI

TARGET OUTPUT DAK FISIK 2020 (1)



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan RI

TARGET OUTPUT DAK FISIK 2020 (2)



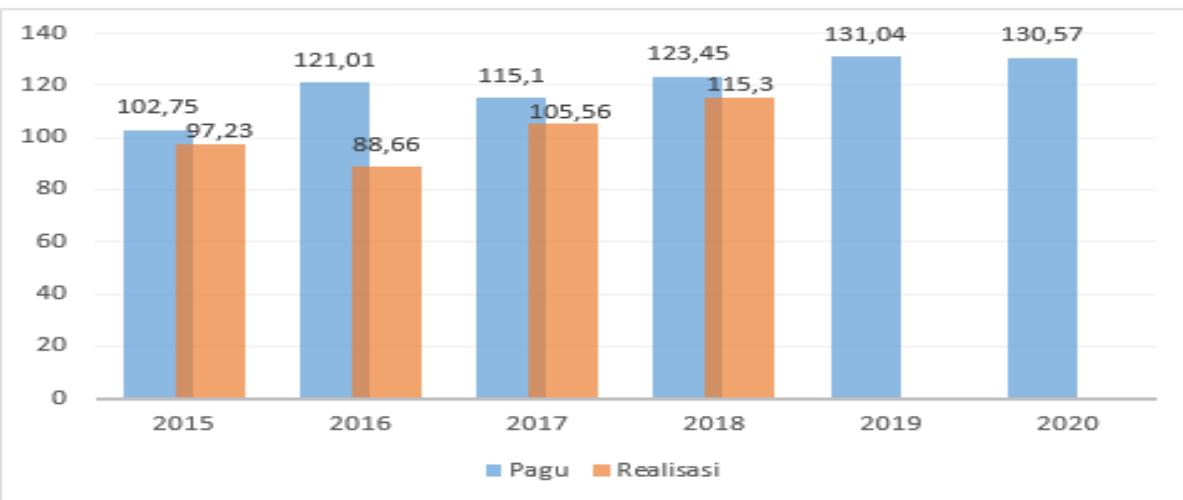
* Warna merah = NEW

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan RI

II. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NONFISIK

DAK Nonfisik ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas dengan harga yang semakin terjangkau. Dalam perkembangannya, DAK Nonfisik telah mengalami berbagai perubahan kebijakan, baik cakupan, besaran *unit cost*, maupun target sasarannya. Cakupan DAK Nonfisik antara lain, belanja operasional pendidikan dan kesehatan, tunjangan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bantuan pelayanan administrasi kependudukan. Tahun 2019 terdapat penambahan jenis DAK Nonfisik jenis baru yaitu BOP Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Kepariwisataan, dan Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS).

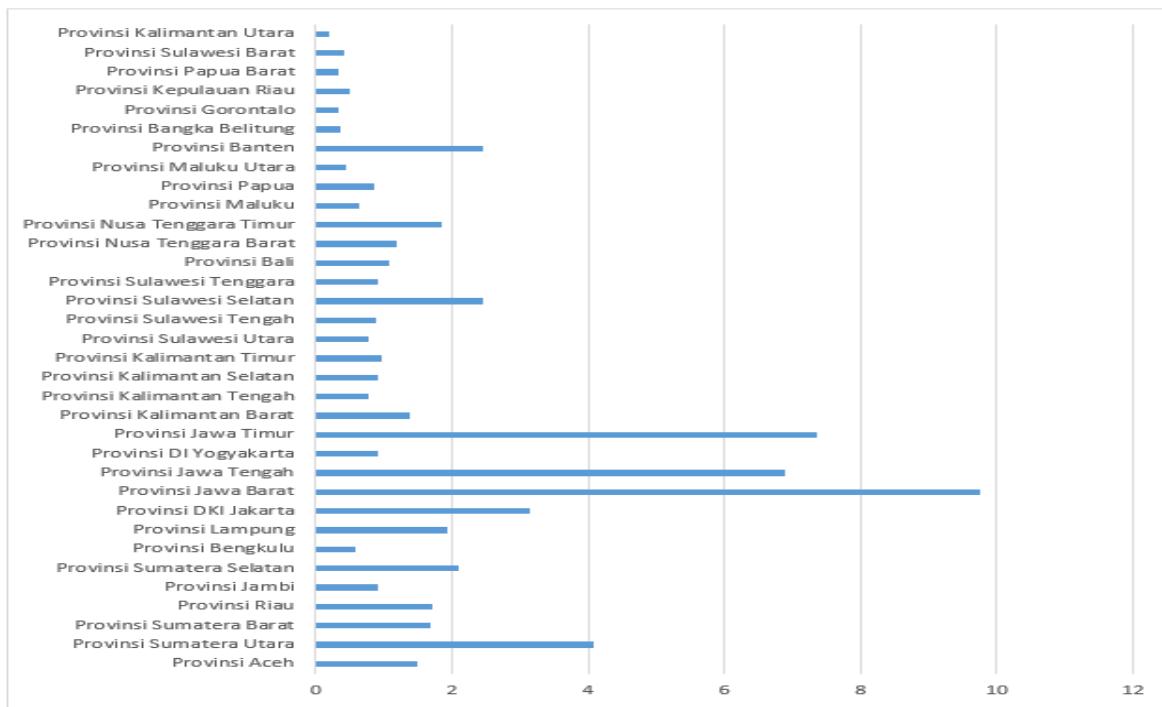
Gambar 5. Perkembangan Alokasi dan Realisasi DAK Non Fisik (Rp triliun)



Sumber: LKPP berbagai tahun dan Nota Keuangan 2020

Selama 5 tahun terakhir, Alokasi dan realisasi DAK Non Fisik relatif meningkat. Namun di tahun 2020, alokasi DAK Non Fisik mengalami penurunan sebesar Rp470 miliar dari APBN tahun sebelumnya dalam sebesar Rp 131,04 triliun, menjadi sebesar Rp130,57 triliun dalam RAPBN 2020

Gambar 6. Alokasi DAK Non Fisik 2019 Per Provinsi (Rp triliun)



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan RI

Pada tahun 2019, Provinsi Jawa Barat mendapatkan alokasi DAK Non Fisik terbesar dibandingkan dengan provinsi lainnya, yakni sebesar Rp9,75 triliun.

Gambar 7. Rincian Perkembangan Alokasi DAK Non Fisik 2011-2019 (Rp triliun)

DAK NONFISIK	2015		2016		2017		2018		2019
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	31,30	31,10	43,92	43,33	45,12	43,55	46,70	44,37	51,23
Bantuan Operasional Pendidikan(BOP) PAUD			2,28	2,28	3,58	3,25	4,07	3,56	4,48
BOP Pendidikan Kesetaraan									1,55
Tunjangan Penghasilan Guru (TPG)	70,25	65,24	69,76	39,17	55,57	49,93	58,29	55,02	56,87
Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru	1,10	0,83	1,02	0,82	1,40	0,94	0,98	0,59	0,91
Tunjangan Khusus Guru(TKG)					1,67	1,40	2,13	1,73	2,31
BOP Museum dan Taman Budaya									0,13
Biaya Operasional Kesehatan (BOK)				3,34	2,63	6,62	5,41	8,55	7,45
Bantuan Operasional (BO) KB				0,22		0,29	0,25	1,81	1,75
Peningkatan Kapasitas Koperasi (PK2) UKM				0,10	0,24	0,10	0,09	0,10	0,09
Pelayanan Administrasi Kependudukan (Asminduk)						0,75	0,75	0,83	0,75
Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)	0,10	0,06	0,20	0,20					
Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan				0,16					
Pelayanan Kepariwisataan									0,21
Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)									0,03
TOTAL	102,75	97,23	121,01	88,66	115,11	105,56	123,45	115,30	131,04

Sumber: LKPP berbagai tahun dan Nota Keuangan 2019

ARAH KEBIJAKAN DAK NONFISIK

EKSISTING/PENGUATAN:

- Meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah, terutama bidang pendidikan dan kesehatan.
- Meningkatkan kualitas pengalokasian dan penyaluran.
- Menyempurnakan *unit cost* dan memutakhirkan data sasaran yang mencerminkan kebutuhan riil daerah.
- Memperkuat kebijakan afirmasi untuk mengejar ketertinggalan kuantitas dan kualitas layanan publik.

BARU:

Menambah menu kegiatan pengawasan obat dan makanan pada Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.

ARAH KEBIJAKAN DAK NONFISIK: DANA BOK BIDANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

	Subbidang Pengawasan Pangan	Subbidang Pengawasan Obat
Tujuan	Meningkatkan fungsi pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) oleh kab/kota sesuai kewenangannya	Meningkatkan efektivitas pengawasan obat di Sarana Pelayanan Kefarmasian oleh kab/kota sesuai kewenangannya
Output	Sistem pengawasan pangan yang sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none">• pengkajian perizinan bagi sarana pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar dan persyaratan• bimbingan teknis bagi pengelola sarana pelayanan kefarmasian
Outcome	Tersedianya pangan yang aman, bermutu, dan bergizi.	Peningkatan kepatuhan sarana pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar yang dipersyaratkan
Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Pengkajian ulang sertifikasi produksi industri rumah tangga• Pengawasan <i>Post-Market</i>* Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)• Sampling dan pengujian pangan industri rumah tangga (PIRT)• Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan.	<ul style="list-style-type: none">• Pembinaan dan Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Toko Obat, Farmasi, Puskesmas, Rumah Sakit dan klinik) Terhadap Pemenuhan Standar dan Persyaratan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota• Melakukan Bimtek Petugas Pengelola Sarana Pelayanan Kefarmasian dalam pemenuhan standar dan persyaratan sarana pelayanan kefarmasian oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

*) Pengawasan/pemeriksaan *post market* dilakukan dalam rangka monitoring terhadap Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diberikan kepada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) melalui pemeriksaan rutin industri rumah tangga pangan sesuai Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT), sampling, dan pengujian pangan yang diproduksi oleh IRTP, serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan

PERKEMBANGAN OUTPUT DAK NONFISIK

No.	DAK Nonfisik	Sasaran					Satuan Output
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	BOS	36.398.156	45.472.372	46.613.792	47.431.975	46.927.860	siswa
2	BOP PAUD	-	3.803.167	5.597.507	6.184.762	7.459.167	peserta didik
3	Tunjangan Profesi Guru	1.337.960	1.299.451	1.310.696	1.230.282	1.189.243	guru
4	Tambahan Penghasilan Guru	365.254	252.087	405.615	265.038	254.400	guru
5	Tunjangan Khusus Guru	-	-	41.599	50.099	59.273	guru
6	BOP Kesetaraan	-	-	-	-	925.000	peserta didik
7	BOP Museum dan Taman Budaya	-	-	-	-	131	museum dan taman budaya
8	BOK						
	- BOK Puskesmas	-	9.740	9.767	9.785	9.909	puskesmas
	- BOK Provinsi	-	-	-	34	34	provinsi
	- BOK Kab/Kota	-	-	-	507	508	kab/kota
	- BOK Stunting	-	-	-	-	160	kab/kota
	- Akreditasi Puskesmas	-	-	2.548	450	2.805	puskesmas
	- Akreditasi Rumah Sakit	-	-	104	119	180	RS
	- Akreditasi Labkesda	-	-	-	27	120	Labkesda
	- Jaminan Persalinan (Jampsal)	5.360.339	5.330.186	5.277.721	4.973.467	ibu hamil	
						-	kab/kota
9	BOKB						
	- Pelayanan KB pada balai penyuluhan KB	-	4.322	4.586	5.157	5.920	balai penyuluhan KB
	- Pelayanan KB pada faskes	-	19.722	20.740	24.312	18.309	faskes
	- Penggerakan program KB	-	-	508	7.116	7.116	kecamatan
	- Pembinaan program KB oleh kader	-	-	-	-	82.917	kelurahan dan desa
	- KIE dan Manajemen	-	-	-	-	508	kab/kota
10	PK2UKM						
		23.500	23.615	23.545	56.056	peserta pelatihan	
		1.500	1.500	1.500	1.279	pendamping	
11	Adminduk	-	-	542	542	542	daerah
12	Pelayanan Kepariwisataan	-	-	-	60.720	peserta	
					119	TIC	
13	Bantuan BLPS	-	-	-	-	1	daerah

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan RI

RENCANA CAKUPAN DAK NONFISIK TA 2020

DAK Nonfisik Bidang Pendidikan

- **Bantuan Operasional Sekolah (Reguler/Kinerja/Afirmasi : 46,5 juta/30,1 ribu/51,5 ribu)**
Mempercepat pencapaian wajib belajar 12 tahun dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
- **Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (7,4 juta anak).**
Meringankan biaya pendidikan bagi anak tidak mampu
- **Tunjangan Profesi Guru (1,2 juta guru)**
Meningkatkan profesionalisme dan kinerja guru yang telah tersertifikasi
- **Tambahan Penghasilan Guru (183 ribu guru)**
Meningkatkan profesionalisme guru PNSD yang belum tersertifikasi melalui peningkatan kesejahteraan.
- **Tunjangan Khusus Guru (36 ribu guru)**
Memberikan kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.
- **Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (882 ribu orang)**
Mengakomodasi kebutuhan anak putus sekolah agar tetap dapat melanjutkan pendidikan.
- **BOP Museum dan Taman Budaya (122/22 (museum/taman budaya))**
Mendorong penyelenggaraan museum dan taman budaya sebagai media edukasi bagi masyarakat khususnya generasi muda, memperkokoh jati diri bangsa, dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

DAK Nonfisik Bidang Kesehatan dan lainnya

- **Bantuan Operasional Kesehatan (10.000 Puskesmas)**
Meringankan beban pembiayaan kesehatan, khususnya pelayanan promotif dan preventif di Puskesmas dan dinas kesehatan.
- **Bantuan Operasional KB (6.157/19.308/7.157 (balai penyuluhan KB/ faskes/kec))**
Operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB, dalam upaya pencapaian tujuan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga secara nasional.
- **Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM) (67.330 peserta dan 1.300 pendamping)**
Meningkatkan kapasitas SDM koperasi, usaha kecil, dan menengah melalui pelatihan dan pendampingan.
- **Pelayanan Administrasi Kependudukan (34 Prov dan 508 Kab/Kota)**
Mendukung penyelenggaraan program dan pelayanan administrasi kependudukan.
- **Pelayanan Kepariwisataan (88.800/75 (peserta pelatihan/Tourist Inform Center))**
Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
- **Bantuan BLPS (Kota yang telah mengoperasikan PLTSa sesuai dengan Perpres No.35/2018)**
Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan melalui pengurangan sampah secara signifikan.

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan



PUSAT KAJIAN ANGGARAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

**JL. JEND. GATOT SUBROTO - JAKARTA PUSAT
TELP. (021) 5715635 - FAX (021) 5715635
[HTTP://www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)
EMAIL: puskaji.anggaran@dpr.go.id**